

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD) BIDANG
INFRASTRUKTUR DI DESA CILOLOHAN KECAMATAN TANJUNGPAYA
KABUPATEN TASIKMALAYA

Oleh:

Tantan Iskandar

Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

ABSTRACT

The Village Fund Management in Cilolohan Village, Tanjungjaya Subdistrict, Tasikmalaya Regency has not been effective in accordance with applicable regulations, especially infrastructure development. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the Village Fund Infrastructure management policy in Cilolohan Village, Tanjungjaya District, Tasikmalaya Regency.

This research uses descriptive research method as a problem solving procedure which is investigated by describing / describing the condition of the subject / object of research (a person, institution, community, etc.) at the present time based on the facts that appear or as they are.

Based on the results of the study showed that the implementation of Village Fund budget management policy in the field of Infrastructure in Cilolohan Village, Tanjungjaya District, Tasikmalaya Regency can run effectively based on standards and policy objectives, implementation resources, communication between organizations, characteristics of implementing agencies, disposition of implementers, and social environmental conditions.

Keywords: Implementation of policies, Village Funds, Infrastructure

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya belum efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya pembangunan infrastruktur. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang Implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa (DD) Bidang Infrastruktur di Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) bidang Infrastruktur di Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan efektif didasarkan pada standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya implementasi, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementator, dan kondisi lingkungan social.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Dana Desa, Infrastruktur

Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Karena itu upaya untuk memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa) merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintahan desa telah mengalami perbedaan sudut pandang utama dalam hal kewenangan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan dan pembelajaran kepada pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia bahwa sekitar 60% (enam puluh per seratus) atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Sehubungan hal tersebut, supaya Pemerintah Desa memiliki kerangka berpikir sistematis, terarah dan terukur dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan sosial, desa diharuskan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disingkat dengan APBDes. APBDes sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu untuk melaksanakan kegiatan. APBDes menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tentu menjadi fokus utama dalam pembangunan. Anggaran memegang peranan penting sebagai suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai Pemerintah Desa Cilolohan tidak akan mampu membayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus

dibiayai dari anggaran pemerintahan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut terakomodir semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk pembangunan desa, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya. APBDes tidak terlepas dari sebuah prinsip perencanaan keuangan, secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang.

Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Sumber pendapatan desa yang diakomodir dalam APBDes sesuai amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan Lain-lain. Perhatian pemerintah pusat terhadap pendapatan desa sangat besar, antara lain berupa Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendukung suksesnya implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa khususnya bidang infrastruktur, dibutuhkan kepala desa dan perangkat desa yang punya kapasitas tinggi. Mereka harus paham dan mengerti betul apa isi regulasi tentang desa. Jika tidak, pasti pengelolaan Dana Desa akan mengalami masalah serius kedepannya. Pengelolaan sebagai sebuah proses seyogyanya berdasarkan suatu perencanaan yang terarah dan terukur, perencanaan akan menjadi arah bagi berbagai program kegiatan yang dilaksanakan, termasuk kaitannya dengan Dana Desa. Mengingat sangat pentingnya perencanaan dana desa secara baik dan benar, tentunya desa harus memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan perencanaan dimaksud agar dapat menunjang efektivitas kerja dan kelancaran administrasi desa. Selain hal tersebut, perencanaan yang baik dan benar pun dapat memberikan manfaat bagi desa untuk dijadikan bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis dengan memperhatikan data-data yang tersedia.

Sejalan dengan hal tersebut, Desa Cilolohan yang merupakan salah satu desa dari desa yang ada di Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya harus mempunyai perencanaan Dana Desa yang baik dan benar. Hal tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya dan supaya program-program di desa tersebut tidak terganggu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga secara otomatis kesejahteraan masyarakat di desa tersebut tercipta. Juga hal tersebut dibutuhkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan efektif serta seluruh aktivitas yang dilakukan di Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya dapat terlaksana dengan baik.

Berikut ini merupakan Perencanaan Anggaran Dana Desa (DD) Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 :

Tabel 1
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) Infrastruktur Desa
Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

Tahap	No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	1	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) Kp. Rancabungur Vol.60 m	59.447.200
	2	Belanja Buku Bacaan Paud dan Posyandu Vol.14 Paket	34.244.000
	3	Tambahan Modal BUMDesa	50.000.000
	4	Pembangunan MDA Kp. Rancabelut Vol. 12 m x 6 m	67.483.000
Jumlah Tahap I			211.174.200
II	5	Lanjutan Pembangunan MDA Kp. Rancabelut Vol. 12 m x 6 m	64.013.600
	6	Pembangunan MDA Kp. Ciwadas Vol. 6 m x 6 m	67.980.100
	7	Pembangunan MCK Kp. Padanaan Vol T. 3 m x L 6 m	52.035.600
	8	Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp. Rncabungur Vol. P 421 m x L 1.50 m x T 0.10 m	125.487.800
	9	Pembangunan Jalan Lingkungan Kp. Tambakan Vol P 123 m x L 1.50 m x T 0.10 m	77.469.500
	10	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) Kp. Padanaan Vol. 50 m	35.361.800
Jumlah Tahap II			422.384.400
III	11	Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) Kp. Padanaan Vol. 50 m	16.580.800
	12	Hotmix Jalan Desa Kp.Lemburluhur Vol.P.450 m x L.2.5 m x T. 0.03 m	122.714.500
	13	Pembangunan Posyandu Kp. Padanaan I Vol. T.4 x L.6 m	72.101.800
	14	TPT / Kirmir Jalan Desa Kp. Parunggolong s/d Kp. Singayun Vol.P130 m x T.3 m x L.0.30 m	87.625.000
	15	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) Kp. Babakan Cikadu Vol. 60 m	63.739.900
	16	Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp. Sindanggalih Vol. P. 289 m x L.2 m x T. 0.10 m	59.586.400
Jumlah Tahap III			422.384.400
Jumlah Total			1.055.871.000

Sumber : Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, 2019.

Dari Implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa (DD) bidang infrastruktur tersebut yang sudah dicairkan baru pada tahap I dan tahan II dikarenakan masa jabatan Kepala Desa definitif berakhir sampai 16 Mei 2019 dan selanjutnya Pelaksana Harian oleh Sekretaris Desa, sementara Pjs. Kepala Desa oleh Bendahara Kantor Kecamatan Tanjungjaya baru di SK-kan tanggal 10 Juli 2019. Sehubungan dengan keuangan desa, sumber keunagan desa salah satunya di dapat dari pendapatan asli desa. Di Desa

Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, pendapatan desa dapat dari koperasi, *home* industri makanan, warung klontongan, angkutan, pasar, usaha peternakan dan kelompok simpan pinjam.

Disamping itu juga, Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya mempunyai potensi unggulan dalam bidang ekonomi yang hasilnya masuk pada pendapatan desa. Potensi ini antara lain sektor pertanian, perikanan, pelayanan jasa dan pertanian. Disamping keuangan desa yang didapat dari pendapatan asli desa, ada juga urusan kabupaten yang diserahkan kepada desa seperti penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, juga termasuk ke dalam penghasilan desa. Disamping itu ada juga dana-dana / bantuan dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat desa yang diturunkan dari pemerintah langsung kepada desa, seperti Dana Desa. Sehubungan dengan Dana Desa yang jumlahnya begitu besar, seharusnya pemerintah desa harus lebih serius dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan Dana Desa bidang infrastruktur supaya lebih efektif dalam penggunaannya.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang atau dipilih untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan rumusan dan ketetapan kebijakan yang dibuat. Menurut Jenkin (Wahab 2008, 15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut

Kebijakan publik dibuat oleh seorang atau sekelompok orang karena dorongan situasi atau kenyataan yang dihadapi sehingga isi kebijakan tersebut mencerminkan pengaruh dari kondisi yang terjadi dengan pemilihan tujuan secara seksama dan tindakan atau cara tertentu sesuai kewenangan secara terarah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Batas-batas kewenangan sebagaimana dinyatakan pada pengertian di atas, mengandung makna bahwa tingkatan kebijakan publik memiliki hirarki yang sesuai dengan hirarki jabatan publik dalam organisasi pemerintahan.

Dikemukakan Rose (Winarno 2012, 20) mengemukakan kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Kebijakan publik merupakan hubungan beragam kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari berbagai faktor yang ada serta memiliki akibat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik sebagai pembuat kebijakan, pelaksana maupun kelompok sasaran. Dalam rangkaian atau proses kebijakan salah satu kegiatan utama dan sangat penting adalah pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan tindak lanjut dari pembuatan kebijakan. Instrumen yang digunakan dalam implementasi umumnya bersifat memaksa yang tercermin dari sifat perundang-undangan sebagai manifestasi kebijakan publik yang mengikat pemerintah dan masyarakat.

Implementasi kebijakan memerlukan berbagai kegiatan operasional yang rinci, melekat, dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat dikatakan

bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan yang bersifat kompleks, oleh karena itu diperlukan kesadaran dan pemahaman (pelaku pelaksana kebijakan) terhadap kompleksitas pelaksanaan kebijakan sehingga dapat dirumuskan dan dilaksanakan upaya sistematis dan terencana.

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, seperti dinyatakan (Subarsono 2005, 88) menyatakan: “implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi birokrat pelaksana untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran”.

Dalam konsep tersebut, implementasi kebijakan publik dapat di pandang sebagai referensi dan nilai dari penguasa sebagai pembuat kebijakan, sedangkan pejabat administrator selaku birokrat hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan tersebut. Birokrat yang akan mempertajam lebih lanjut dari suatu kebijakan melalui implementasi yang diarahkan kepada masyarakat sasaran.

Menurut Anderson (Agus 2012, 22) dengan mengemukakan bahwa implementasi dimaknai sebagai pengelolaan hukum (karena kebijakan telah disahkan dalam bentuk hukum) dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya. Implementasi dipahami sebagai suatu proses menjalankan, menyelenggarakan atau mengupayakan agar alternatif-alternatif yang telah diputuskan dapat berjalan sesuai ketentuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana. Rumusan-rumusan kebijakan yang bersifat dalam produk hukum, baru nyata dan kongkrit setelah diimplementasikan secara nyata untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu Implementasi Kebijakan. Menurut Meter dan Horn (Agustino 2008, 131) dengan mengemukakan bahwa :

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan tentu tidak semulus yang diharapkan, banyak faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Berkenaan hal tersebut, faktor yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam implementasi kebijakan dikemukakan Metter dan Horn (Nawawi, 2009, pp. 139 - 141) yaitu :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujud. Dalam standar dan sasaran kebijakan

tidak jelas sehingga tidak bisa terjadi multi – interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah – pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

- 2) Sumberdaya Implementasi. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material (*material resources*), dan sumber daya waktu.
- 3) Komunikasi antar Organisasi. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama diantara pihak yang terlibat maupun antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Dalam suatu Implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat penting karena implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya ketegasan, ketat terhadap sanksi hukum dan jumlah yang sesuai dengan cakupan kebijakan
- 5) Disposisi implementator. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementator ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respons implementator terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementator untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intensitas disposisi implementator, yakni, preferensi nilai yang dimiliki tersebut. Para pengambil keputusannya perlu mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan
- 6) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup kondisi ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap kenyataan-kenyataan yang tengah terjadi sebagai suatu gejala atau masalah yang harus segera diatasi melalui analisis secara mendalam. Metode deskriptif kualitatif (Surakhmad 2002, 131) dengan menyatakan bahwa:

Pada umumnya bersamaan sifat dan segala bentuk penyelidikan deskriptif ini ialah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, penelitian deskriptif menekankan pada pemecahan masalah-masalah aktual yang ada pada masa sekarang dan dari data yang

diperoleh dilakukan penyusunan data, dijelaskan serta kemudian dianalisis. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan hasil penelitian.

Pembahasan

Salah satu tahapan penting dalam suatu kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau pemerintah, mungkin ada anggapan tahapan ini kurang berpengaruh dan tidak penting dibandingkan dengan proses perumusan yang sering melibatkan banyak pihak. Dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal supaya tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Kebijakan tentang pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan yang perlu dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak, dalam kajian adalah Pemerintah Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya. Dana desa merupakan kebijakan yang memberikan manfaat bagi desa, khususnya masyarakat baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Melalui imlementasi yang tepat diharapkan kebijakan mengenai pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai rencana atau tujuan yang dikehendaki, menghindari adanya ketidak sesuain pelaksanaan kebijakan yang dapat mengakibatkan kurang berhasilnya pelaksanaan program kebijakan yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dianalisa dengan menggunakan model yang dikembangkan Meter dan Horn melalui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

1. Standar dan sasaran kebijakan

Suatu kebijakan dibuat dengan maksud atau tujuan tertentu, kebijakan mengenai pengelolaan dana desa pada hakekatnya bertujuan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan-tujuan tersebut masih bersifat umum, sehingga pada tataran implementasi yang diarahkan kepada kelompok sasaran dalam hal ini adalah masyarakat, maka kebijakan dimaksud harus mampu memberikan kejelasan dan dipahami oleh pelaksana dan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan(Wahab 2008, 90) dengan menyatakan “apabila tujuan kebijakan tidak jelas maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran”.

Ketika standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka dapat terjadi penolakan dari masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan implementasi kebijakan tidak berhasil. Kebijakan yang dibuat tidak boleh menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi dari pemerintah terhadap pemenuhan kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya pada hakekatnya merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional di berbagai bidang, termasuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa dari variabel standard dan sasaran kebijakan, peneliti mengetengahkan dua indikator sebagai instrumen penelitian yaitu kebijakan sesuai dengan harapan masyarakat terdapat standar atau prosedur yang jelas

Kedua indikator tersebut, berdasarkan hasil observasi menurut peneliti variabel standar atau prosedur pelaksanaan kebijakan dari implementasi kebijakan pengelolaan dana desa sudah berjalan cukup sesuai, namun perlu penambahan pada teknis pelaksanaannya, misalnya pemerintah desa membuat prosedur teknis yang lebih jelas mengenai berbagai aspek pengelolaan dana desa, tidak hanya berdasarkan pada peraturan yang dikelarkan oleh pemerintah. Demikian halnya dengan, aspek kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat perlu lebih diprioritaskan oleh pemerintah desa, meskipun sudah terdapat peraturan-peraturan, namun dari segi kepentingan pemerintah desa diharapkan dapat membuat sebuah terobosan dalam penerapan kebijakan sehingga harapan masyarakat terhadap insfrakstruktur yang dibutuhkan sesuai kondisi yang berkembang.

2. Sumberdaya implementasi

Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu kebijakan. Salah satunya adalah faktor sumberdaya, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan sebuah kebijakan merupakan salah satu unsur yang perlu mendapat perhatian. Sebagaimana dikemukakan (Nawawi 2009, 137) dengan mengemukakan tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan efektif tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan sebab secara logika peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa ditinjau dari variabel sumber daya, peneliti mengetengahkan tiga indikator sebagai instrumen penelitian yaitu kualitas hasil kerja pegawai sesuai standar/ketentuan, peralatan kerja yang memadai dan kecepatan dan ketepatan proses pelaksanaan pekerjaan. Dari ketiga indikator yang dijadikan instrumen penelitian, sesuai hasil observasi kualitas hasil kerja sudah cukup sesuai dengan ketentuan, demikian pula penilaian yang tersaji dalam hasil wawancara, mayoritas informan menilai pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai atau perangkat desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Untuk indikator peralatan kerja yang memadai mendapat tanggapan positif, mayoritas informan menyebutkan bahwa peralatan kerja yang ada dan digunakan oleh perangkat desa cukup memadai. Untuk indikator kecepatan itu untuk indikator kecepatan dan ketepatan proses pelaksanaan pekerjaan, masih perlu lebih diperhatikan oleh perangkat desa, mencermati hasil wawancara, informan memberikan penilaian negatif, mayoritas menganggap bahwa kecepatan dan ketepatan proses pelaksanaan pekerjaan relatif masih kurang, sebagaimana disiratkan (Siswanto, 2003, p. 70) salah satu dalam penyelenggaraan kegiatan adalah adanya sendi atau aspek kecepatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaannya. Kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan kerja serta hasil-hasilnya merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, dalam hal ini adalah perangkat Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, melalui kecepatan dan ketepatan diharapkan pencapaian tujuan dapat terwujud sesuai rencana yang ditetapkan.

3. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan perlu terus dilakukan oleh pelaksana dengan masyarakat maupun lembaga-lembaga yang ada, hal ini merupakan salah satu bentuk dari usaha menumbuhkan adanya pemahaman dan saling pengertian untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, tidak akan terlepas dari proses komunikasi antara pegawai maupun dengan masyarakat, serta koordinasi internal dan eksternal dengan lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dimaksud. Selanjutnya untuk kepentingan analisis terhadap variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, peneliti menggunakan dua indikator kemampuan pegawai dalam berkomunikasi dan kemampuan koordinasi pegawai dengan pegawai lain.

Pegawai dalam hal ini adalah perangkat desa dituntut memiliki kemampuan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan ketika menjelaskan kebijakan dan proses pelaksanaan kegiatan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, demikian pula dalam hal koordinasi, baik di lingkungan pemerintah desa atau antar seksi maupun dengan lembaga lain. Berdasarkan hasil observasi, pegawai pada umumnya sudah cukup baik ketika melakukan komunikasi satu sama lain, salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah cara menjalin komunikasi supaya lebih menunjukkan perhatian dan memberikan kesan ramah serta bersahabat. Penilaian yang diperoleh dari hasil wawancara relatif berimbang antara yang mengatakan komunikasi sudah berjalan dengan baik dan yang menyebutkan masih kurang.

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam implementasi pengelolaan dana desa, dikemukakan (Widodo 2007, 108) dengan mengemukakan bahwa melalui proses komunikasi menjadi jelas mengenai substansi kebijakan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan. Selanjutnya untuk indikator kemampuan pegawai melakukan koordinasi masih perlu lebih ditingkatkan, memperhatikan hasil wawancara, mayoritas informan menilai koordinasi diantara pegawai atau perangkat desa masih kurang. Koordinasi sangat penting dalam implementasi kebijakan, mengingat melalui koordinasi dapat tercipta keselarasan dan adanya saling pemahaman dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang akan menunjang terhadap keberhasilan suatu kebijakan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik pada hakekatnya merupakan serangkaian kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah/badan-badan pemerintah yang akan diterapkan secara sah kepada anggota masyarakat untuk mencapai tujuan atau memenuhi kepentingan publik. Sehubungan hal tersebut, salah satu faktor yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan adalah karakteristik agen pelaksana, dengan kata lain kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah turut ditentukan oleh sikap dari para aparat dalam melaksanakannya.

Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya tidak pernah lepas dari keberadaan agen pelaksana yaitu para pegawai, bukan hanya dari aspek jumlah namun dalam penerapan kebijakan para pegawai perlu memiliki sikap tegas, sebagaimana dikemukakan Edward III (Agustino 2008, 143) dengan menegaskan bahwa “staff merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan”.

Berdasarkan, hal tersebut untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan ditinjau dari variabel karakteristik agen pelaksanaan, peneliti menggunakan dua indikator sebagai instrumen penelitian yaitu ketegasan pegawai melaksanakan kebijakan dan jumlah pegawai yang memadai. Memperhatikan observasi sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, dari segi ketegasan dalam menerapkan kebijakan pengelolaan dana desa sikap pegawai sudah sangat baik. Peraturan atau ketentuan-ketentuan mengenai dana desa senantiasa menjadi pedoman kerja, sangat jarang bahkan tidak pernah ditemukan ada toleransi atau celah terjadinya penyimpangan. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan informan bahwa pegawai sangat tegas dalam menerapkan kebijakan dan tidak ada toleransi, serta mampu menerapkan ketegasan kepada semua pihak, termasuk apabila ada “intervensi” dari pihak-pihak tertentu. Sementara dari segi jumlah, pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa masih sangat kurang, hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan, pelaksanaan pekerjaan cenderung kurang cepat dan tidak jarang satu orang perangkat mengerjakan banyak tugas yang berbeda.

Demikian halnya dengan penilaian hasil wawancara yang mengganggu pegawai yang masih kurang memadai dibandingkan volume pelaksanaan tugas pelayanan, dari 7 (tujuh) orang informan hanya dua orang yang berpendapat pegawai yang ada sudah cukup memadai. Ketersediaan jumlah pegawai yang kurang memadai tentu akan berdampak pada proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa, hal ini dapat menyebabkan keberhasilan implemtasi kebijakan menjadi tidak optimal.

5. Disposisi implementator

Kebijakan dipahami sebagai salah satu instrumen dalam pemecahan suatu masalah atau mengatur tatanan kehidupan masyarakat sesuai kondisi yang diharapkan. Kebijakan dibuat untuk dapat memberikan solusi terhadap kepentingan individu yang bermacam-macam. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan bagi rakyatnya, keberhasilannya turut ditentukan oleh sikap dari para pelaksana kebijakan. Kebijakan dana desa bukan hanya seperangkat dokumen, namun harus dapat diimplementasikan melalui serangkaian tindakan yang diarahkan dan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat, sehingga dengan demikian sikap para pegawai sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam penerapannya.

Menurut pandangan peneliti kebijakan dana desa adalah kebijakan dari pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh masyarakat, tidak menutup kemungkinan terdapat retensi dalam penerapannya, sehingga para pelaksana atau pegawai perlu memahami mengenai kebijakan dimaksud. Sehubungan hal tersebut, dalam menganalisis faktor disposisi implementator, peneliti menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu kemampuan pegawai membantu permasalahan atau kesulitan pelaksanaan kebijakan dan pemahaman pegawai terhadap kebijakan

Memperhatikan hasil observasi dan wawancara, para pegawai atau perangkat desa belum sepenuhnya mampu membantu mengatasi permasalahan atau kesulitan yang ada. Permasalahan yang terjadi penyelesaiannya sering terpusat kepada kepala desa, sedangkan kemampuan dari kepala desa mungkin pula terbatas, mengingat banyak hal yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, (Surakhmad 2002, 184) dengan menyatakan bahwa perintah-perintah implementasi mungkin saja diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi

ketika pelaksana kurang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi cenderung tidak akan efektif.

Selanjutnya untuk indikator pemahaman pegawai terhadap kebijakan sudah cukup baik, dari hasil wawancara, mayoritas menilai bahwa pegawai sudah cukup paham terhadap kebijakan yang diterapkan. Dikemukakan Hogwood dan Gunn (Wahab 2008, 172) dengan menyatakan bahwa salah satu syarat keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya pemahaman dan kesepakatan.

6. Kondisi lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Sehingga dengan demikian dapat dimaklumi apabila implementasi kebijakan bukan merupakan suatu proses yang mudah dilaksanakan. Demikian halnya dengan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, faktor lingkungan sosial dan politik menjadi salah satu variabel yang turut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan di lingkungan masyarakat serta proses pembangunan infrastruktur di Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya. Lingkungan ekonomi, apabila dikaitkan dengan biaya, maka kondisi ini merupakan salah satu yang menjadi faktor keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, harus dihindari adanya beban biaya yang memberatkan masyarakat sebagai dampak pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Berdasarkan hasil observasi maupun hasil wawancara, tidak ada beban biaya yang mengikat kepada masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya yang dibiayai oleh dana desa, semua informan menyebutkan tidak ada beban biaya bagi masyarakat, demikian pula untuk indikator kedua, masyarakat sudah cukup mengetahui adanya kebijakan dana desa. Dari aspek lingkungan politik, implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya menurut pandangan peneliti sudah cukup baik. Dukungan elite politik tersebut, dalam kaitannya dengan implementasi pengelolaan dana desa, terlihat melalui sikap aktif beberapa pengurus partai politik atau aktivitis politik yang memfasilitasi bahkan terjun langsung ke masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa baik melalui observasi maupun wawancara dengan informan penelitian, dalam analisis pembahasan implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa bidang infrastruktur di Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dapat dikatakan sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lebih baik lagi sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat desa..

Daftar Pustaka

- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Nawawi, Islamil. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan. Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN).
- Subarsono, A G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surahmad, Winarno. 2002. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses. Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *CAPS Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*.